

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam pasal (1) ayat (6) di jelaskan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaa otonomi daerah dan desentralisasi fiscal menjadikan pemerintah daerah memiliki *power*, diskresi dan kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimilikinya untuk kesejahteraan masyarakat (Mahmudi, 2010). Pada era otonomi daerah sekarang ini pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih baik.

Menurut Bagiada (2013), kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendanaan penting yang dapat mencerminkan kemampuan kemandirian daerah dalam pembangunan daerah.

Untuk mencapai kemandirian keuangan suatu wilayah atau daerah, tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Daries (2009), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah di peroleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1).

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh

Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Halim dan Kusufi (2013), lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam situs resmi Bangka Selatan (2012), Sektor Pertanian merupakan sektor unggulan dalam prioritas pembangunan daerah Bangka Selatan. Hal ini didasari karena sektor utama dalam mata pencaharian penduduk. PDRB Sektor Pertanian pun mencapai 42,65 % dari seluruh kegiatan ekonomi daerah. Sub sektor perkebunan merupakan sub sektor utama dengan persentase kontribusi terhadap PDRB mencapai 19,01 %. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bangka Selatan adalah lada, karet, kelapa sawit dan kelapa. Kelautan dan perikanan juga merupakan sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Berkisar 7,35 % dari total PDRB Kabupaten Bangka Selatan dikontribusikan dari sektor kelautan dan perikanan. Wilayah pengembangan potensi kelautan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan terletak di Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Toboali dan

Kecamatan Simpang Rimba. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang masih menjadi andalan ekonomi masyarakat Bangka Selatan. Timah merupakan produk andalan di sektor pertambangan. Kontribusi sektor pertambangan khususnya pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan mencapai 24,37 %. Berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Selatan, diharapkan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut ini adalah tabel realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016 dan PAD Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2012-2016.

Table 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Tahun	Realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan	Realisasi PAD Kota Pangkalpinang
2012	Rp. 20.861.848.761,57	Rp. 67.616.225.250,49
2013	Rp. 20.419.445.984,62	Rp. 92.106.752.248,02
2014	Rp. 28.907.044.191,72	Rp.113.817.278.385,97
2015	Rp. 37.066.252.156,88	Rp.135.305.782.559,87
2016	Rp. 43.715.959.380,75	Rp.136.257.398.973,11

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan & Kota Pangkalpinang, Data Diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan, namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga 2016. Sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan atau kenaikan setiap tahunnya. Realisasi PAD Kabupaten Bangka Selatan sangat rendah sekali jika di bandingkan dengan realisasi PAD Pemerintah Kota Pangkalpinang.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pembangunan suatu daerah dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.

Berikut ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016:

Table 1.2 Rasio Kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Tahun	PAD	Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Kemandirian (%)
2012	Rp. 20.861.848.761,57	Rp. 508.155.269.750,83	4,11%
2013	Rp. 20.419.445.984,62	Rp. 547.614.367.636,48	3,73%
2014	Rp. 28.907.044.191,72	Rp. 627.646.047.080,34	4,61%
2015	Rp. 37.066.252.156,88	Rp. 713.716.221.708,15	5,19%
2016	Rp. 43.715.959.380,75	Rp. 713.716.221.708,15	6,13%
Total	Rp.150.970.550.475,54	Rp.3.110.848.127.883,95	4,85%
Rata-rata	Rp. 30.194.110.095,11	Rp. 622.169.625.576,79	4,85%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan, Data Diolah Peneliti, 2018

Dari table 1.2. kemandirian keuangan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,13%, sedangkan terendah pada tahun 2013 sebesar 3,73% dan rata-rata kemandirian sebesar 4,85%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten berada pada kriteria rendah sekali, maka dapat dinyatakan ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan terhadap dana transfer pusat/provinsi masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya atau rendahnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Adapun penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terdiri dari, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam

dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak katas tanah dan bangunan yang masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda-beda.

Table 1.3 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bangka Selatan

NO	TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH
1	2012	Rp 4.310.977.497,00
2	2013	Rp 5.909.496.811,00
3	2014	Rp 8.945.377.008,00
4	2015	Rp 10.521.067.245,00
5	2016	Rp 14.795.630.866,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan, Data Diolah Peneliti, 2018

Dari tabel 1.3 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bangka Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Retribusi daerah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dapat digolongkan menjadi retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan-DINKES, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi pelayanan kesehatan-RSUD. Jenis retribusi jasa usaha yang terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pelayanan pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan retribusi penyeberangan di atas air. Jenis retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan (HO), retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Table 1.4 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Selatan

NO	TAHUN	REALISASI RETRIBUSI DAERAH
1	2012	Rp 2.301.923.890,00
2	2013	Rp 3.444.801.871,96
3	2014	Rp 5.483.555.180,49
4	2015	Rp 7.067.936.594,23
5	2016	Rp 5.315.407.744,05

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan, Data Diolah Peneliti, 2018

Dari table 1.4 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hanya pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan.

Table 1.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Bangka Selatan

NO	TAHUN	REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
1	2012	Rp 4.586.450.936,40
2	2013	Rp 2.707.659.369,40
3	2014	Rp 319.221.253,50
4	2015	Rp 3.699.898.240,14
5	2016	Rp 4.089.384.703,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan, Data Diolah Peneliti, 2018

Dari tabel 1.5 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Bangka Selatan, pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan, namun terus mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Data Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Selatan, lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan merupakan komponen pembentuk PAD Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki sumbangan terbesar. Adapun penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

terdiri dari, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari penerimaan lain-lain yang sah.

Table 1.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Bangka Selatan

NO	TAHUN	REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH AYNG SAH
1	2012	Rp 9.662.496.438,17
2	2013	Rp 8.357.487.932,26
3	2014	Rp 14.158.890.749,73
4	2015	Rp 15.777.350.077,51
5	2016	Rp 19.515.536.067,29

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Selatan, Data Diolah Peneliti, 2018

Dari tabel 1.6 menjelaskan bahwa realisasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hanya pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan.

Dalam perkembangannya pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Bangka Selatan tidak diiringi dengan mandirinya keuangan daerah. Hal ini menyebabkan masih tergantungnya pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Oleh karena itu menjadi perhatian dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah daerah tersebut. Beberapa faktor yang bisa menentukan besarnya pendapatan asli daerah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah besarnya pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekaayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk mengetahui apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Periode 2012-2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan Periode 2012-2016?
2. Apakah pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016?
3. Apakah pengaruh retribusi daerah secara parsial terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016?
4. Apakah pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016?
5. Apakah pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah secara parsial terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016?
6. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian daerah pada Kabupaten Bangka Selatan 2012-2016?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menjadi luas dan dapat di teliti oleh penulis secara lebih mendalam serta keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Maka penelitian ini hanya pada beberapa variabel saja yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah dan penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan atau gambaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.
2. Untuk menganalisis apakah pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.
3. Untuk menganalisis apakah retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.
4. Untuk menganalisis apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.

5. Untuk menganalisis apakah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berpengaruh secara parsial terhadap keandirian keuangan daerah pada kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.
6. Untuk mengetahui apakah komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten Bangka Selatan periode 2012-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai sarana informasi dan untuk menambah wawasan tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh dinas pemerintahan terutama badan keuangan daerah sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi badan keuangan daerah Kabupaten Bangka Selatan untuk menentukan kebijakan yang lebih baik terutama mengenai pendapatan asli daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, teknik pengambilan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek yang diteliti, memaparkan hasil olah data dan selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan konsepsi dan teori yang dipakai dalam rangka pencapaian tujuan penelitian serta memuat penjelasan keterkaitan antara hasil analisis data dengan variabel yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan temuan pokok, baik bersifat substansial maupun teknis serta dikemukakan juga implikasi dari hasil pembahasan, serta saran yang merupakan implementasi dari penemuan-penemuan dan rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

